

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,  
TRANSPARANSI, DAN AKSESI BILAS LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
PADA DINAS PARIWISATA  
KOTA SABANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana

**OLEH  
RISKA OKTAFIANI  
NPM.18100016  
PRODI. AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)  
BANDA ACEH  
2022**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, karunia dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selajutnya, shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari dan mengakui sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian pendidikan Program Sarjana ini tidak berjalan sendiri, ada banyak pihak yang telah banyak membantu penulis baik dari segi aspek materil maupun spiritual. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan setulus hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Banta Karollah, SE, M.S. selaku Ketua STIES Banda Aceh
2. Ibu Intan Novia Astuti, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi STIES Banda Aceh
3. Ibu Eliana, SE, M.Si dan Bapak Endra Gunawan, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua.
4. Ibu Dra. Nurhayati, M.Si, Ak. CA dan Ibu Intan Novia Astuti, SE, M.Si, selaku Dosen Penguji Pertama dan Penguji Kedua.
5. Para Dosen Program Studi Akuntansi STIES Banda Aceh
6. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda dengan cinta yang telah

memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, kasih yang dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.

7. Teman-teman Program Studi Akuntansi angkatan tahun 2018 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat sampai selesai studi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari sepenuhnya, walaupun begitu banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti penyusunan skripsi ini dianggap sudah sangat sempurna, tetapi masih banyak kekurangan baik dari segi tehnik maupun dari segi penyampaian materi. Hal ini, merupakan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penulisan kearah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga segala bantuan yang diberikan dari berbagai pihak terhadap kesuksesan penulisan skripsi ini, mendapatkan ganjaran pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Banda Aceh, 02 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Skop Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	9
2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan .....	9
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan .....	9
2.2 Penyajian Laporan Keuangan .....	18
2.2.1 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan .....	18
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	12
2.3 Transparansi.....	14
2.3.1 PengertianTransparansi .....	14
2.4 Eksesibilitas Laporan Keuangan.....	16
2.4.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan .....	16
2.5 Penelitian Terdahulu.....	19
2.6 Kerangka Konseptual .....	22
2.7 HipotesisPenelitian .....	24
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	25
3.1 PopulasidanSampel.....	25
3.1.1 Populasi.....	25
3.1.2 Sampel.....	25
3.2 Metode Penarikan Sampel .....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Operasional Variabel .....	27
3.5 Metode Analisis Data .....	32
3.6 Pengujian Asumsi Klasik.....	34
3.7 Uji Hipotesis .....	35
3.8 Koefisien Korelasi Dan Determinasi ( $R^2$ ) .....	37

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN</b>	39
4.1	Hasil Penelitian	39
4.1.1	Analisis Data Hasil Penelitian	39
4.1.2	Karakteristik Responden	39
4.2	Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	42
4.2.1	Pengujian Validitas	42
4.2.2	Pengujian Reliabilitas	44
4.3	Analisis Daskriptif	44
4.3.1	Persepsi Responden Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	45
4.3.2	Persepsi Responden Terhadap Penyajian Laporan Keuangan	46
4.3.3	Persepsi Responden Terhadap Transparansi	48
4.3.4	Persepsi Responden Terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan	49
4.4	Uji Asumsi Klasik	51
4.5	Hasil Uji Hipotesis	53
4.6	Koefisien Korelasi Dan Determinasi ( $R^2$ )	58
4.7	Pembahasan Hasil	59
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	62
<b>DAFTAR</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	64
<b>DAFTAR</b>	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel II.1. Hasil PenelitianTerdahulu .....	20
Tabel III.1. Operasional Variabel.....	31
Tabel III.5. Kategori Reliabilitas <i>Guilford</i> .....	45
Tabel IV.1. Karakteristik Responden.....	40
Tabel IV.2. Hasil Uji Validitas .....	43
Tabel IV.3. Hasil Uji Reliabilitas.....	44
Tabel IV.4. Pernyataan Responden Untuk Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan .....	45
TabelIV.5. Pernyataan Responden Untuk Variabel Penyajian Laporan Keuangan .....	47
TabelIV.6. Pernyataan Responden Untuk Variabel Transparansi .....	48
TabelIV.7. Pernyataan Responden Untuk Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan .....	50
TabelIV.8. Hasil Pengujian Multikolinearitas .....	52
TabelIV.9. PengaruhVariabel Independen Terhadap Variabel Dependen .....	54
TabelIV.10. Hasil Uji F (Simultan).....	55
TabelIV.11. Hasil Uji T (Parsial).....	56
TabelIV.12. Nilai Koefisien Determinasi $R^2$ .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
GambarII.1. Kerangka Konseptual .....	22
GambarIV.1. Output Hasil Uji Normalitas Data.....	51
GambarIV.2. Output Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.Kuesioner Penelitian

Lampiran 2.Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 3.Hasil Output Pengujian SPSS Karakteristik Responden

Lampiran 4.Hasil Output Pengujian SPSS Hasil Uji Validitas

Lampiran 5.Hasil Output Pengujian SPSS Hasil Uji Realiabilitas

Lampiran 6.Hasil Output Pengujian SPSS Hasil Uji Deskriptif

Lampiran 7.Hasil Output PengujianSPSS Hasil Pengujian Hipotesis

**ABSTRAK**  
**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, TRANSPARANSI,  
DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS  
PARIWISATA KOTA SABANG**

**Nama : Riska Oktaviani**  
**NPM : 181000016**  
**Pembimbing I : Eliana SE, M.Si**  
**PembimbingII : Endra Gunawan, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Sabang. Permasalahan yang timbul adalah apakah penyajian laporan keuangan, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Sabang? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penyajian laporan keuangan, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan baik secara simultan maupun secara parsial.

Sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 30 responden. Variabel-variabel penyajian laporan keuangan, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan skala *Likert*, dan data di peroleh dengan menyebarkan kuesioner ke responden. Analisis data menggunakan analisis statistik model korelasi dan regresi berganda dengan bantuan *Software* SPSS Versi 21. Untuk menguji setiap item pada setiap variabel telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara penyajian laporan keuangan, transparansi, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil uji F di peroleh angka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan uji signifikan bahwa  $p\text{ value} < 0,000 < p$  yang di tetapkan sebesar 0,05 yang berarti signifikan. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa : 1. Penyajian laporan keuangan, berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  $T_{hitung} 1,746 > T_{tabel} 1,703$  dan  $p\text{ value} 0,013 < 0,05$  berarti signifikan. 2. Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.  $T_{hitung} 5,749 > T_{tabel} 1,703$  dengan  $p\text{ value} 0,005 < 0,05$  berarti signifikan. 3. Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  $T_{hitung} 4,757 > T_{tabel} 1,703$  dengan  $p\text{ value} 0,000 < 0,05$  berarti signifikan.

**Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Transparansi, Aksesibilitas Laporan Keuangan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Permasalahan**

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kepada publik. Perhatian semakin besar terhadap praktek akuntansi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat agar dikelola secara akuntabel dan transparan. Laporan keuangan dari instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1997 (Kurniawati, 2016).

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Winidyaningrum, 2010).

Akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1997. Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan

kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2015). Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan daerah di mana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana, 2013).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya didapatkan. Namun pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal (Hehanussa, 2015). Diperlukan reformasi dalam aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas (accessibility) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai

laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif juga tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2013). Sehingga pemerintah selain menyajikan laporan keuangan juga harus memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan fasilitas kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

‘Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah. Tujuan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders.

Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner (Hehanussa, 2015).

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Government). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar

berbangsa dan bernegara yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan itu, pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD kepada DPR RI dan DPRD. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pasal 23 UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara segera setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewajiban pemerintah untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan negara. Pernyataan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda). Pemda juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan membuat laporan keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib membuat laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD), laporan ini adalah laporan kinerja yang dirancang untuk publik dan dipublikasikan di media atau tempat-tempat umum. Laporan ini diperlukan agar rakyat mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah daerahnya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sabang. Selanjutnya BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian BPK RI masih menemukan beberapa masalah. Permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI tersebut antara lain pengelolaan Retribusi Daerah yang belum tertib. OPD Teknis terkait pengelolaan Retribusi daerah adalah Dinas Pariwisata kota Sabang, yang dinilai belum maksimal dalam pengelolaan Retribusi Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Transparansi, dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pariwisata Kota Sabang”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang yang di paparkan di atas maka, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan, transparansi dan akseibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Sabang?
2. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata Kota Sabang?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dinas pariwisata kota Sabang?

4. Apakah akseibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dinas pariwisata kota Sabang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana terpaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah penyajian laporan keuangan, transparansi dan akseibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata Kota Sabang.
3. Untuk mengetahui Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata Kota Sabang.
4. Untuk mengetahui Apakah akseibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata Kota Sabang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh wawasan mengenai perkembangan ilmu akuntansi dan menambah pengetahuan mengenai akuntansi.
2. Bagi kampus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi

sebagai perbandingan bagi peneliti lain mengenai materi yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada sebelumnya.

3. Bagi dinas pariwisata kota sabang, peneliti berharap hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyajian laporan keuangan, tranparasi dan aksebilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.
4. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang penyajian laporan keuangan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan atau referensi mengenai akuntansi sektor publik.

### **1.5 Skop Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi objek penelitiaannya, yaitu dibatasi hanya meneliti mengenai penyajian laporan keuangan, transparansi dan aksebilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Sabang yang berkedudukan di Jalan Cut Ali, Kuta Barat, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 24411.

## DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Abdul Halim. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi daerah*”, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Jogjakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Adah, E. N, Kurniawati, D dan Yunita. 2016. *Analisis Kemampuan Kognitif Mahasiswa Pada Konsep Asam-Basa Menggunakan Tes Berdasarkan Taksonomi Bloom Revisi*. *Jurnal Kimia dan Pendidikan* Vol.1 No 1.Banten : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Aiyah, Siti dan Nahar Aida. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8 Nomor 2:97-189*.
- Diamond (2012). “*Performance budgeting-is Acrual Required?*” *IMF Working Paper*.PT Raja Grafindo Persada.
- Farida, Linda M.A. (2018) *Pengaruh Penyajian Laporan keuangan Daerah Dan Akseibilitas laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Fakultas Ekonomi UNMUHA ponorogo.
- Ghozali,Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hehanussa, S. J. (2015) *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*.
- Hehanussa, Salomi J. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Kota Ambon*. *Jurnal, UNISSULA*.

- Indria, Ayu. N. (2018) *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasik Malaya* Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Indriantoro, Nr dan Bambang Supomo. (2013). *Metodologi penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Krina, Loina Lalolo. (2013). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. (2013). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Buletin Teknis Nomor 03 tentang *Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. KSAP.
- Mahmudi, (2015) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2019) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muindro Renyowijoyo, (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wancana Media.
- Mulyana, B. (2013). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2 (1).
- Nurhadianto, Toni dan Khamsiah, Nur, 2019. *Analisis Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung)*. "Jurnal TECNOBIZ Vol.3, No.5,2019,25-30. ISSN 2655-

3457

Republik Indonesia, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sande, Peggy. (2013). *“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. “Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatera Utara. Hlm. 1-20.

Sande, P. (2013) *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatrera Barat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Shende, S. and T. Bennet. 2014. *Transparency and Accountability in Publik Financial Administrasion*. Concept Paper, United Nations.

Siregar, Syofian, (2013). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Dilengkapi dengan perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17. PT Bumi Aksara, Jakarta. Standar Akuntansi Keuangan No. 1 berisi tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Peneltian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wikipedia: “Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu

lembaga pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu Lembaga”.

Winidyaningrum, Celvina, dan Rahmawati. (2013). Pengaruh Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: *Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten. Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103.